

ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TOMOHON (Studi Kasus Di Bapelitbangda Kota Tomohon)

Abigaille Cattnaya Rampen¹, Ventje Senduk², Aprilli Bacillius³

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Kab.Minahasa

e-mail: abigaile.rampen1998@gmail.com, ventjesenduk@gmail.com, aprillicacillius@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya di BAPELITBANGDA Kota Tomohon. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu; Metode Wawancara dan Metode Studi Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik; Pengumpulan Data, *Snowball Sampling*, Reduksi Data, *Display Data*, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil didalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BAPELITBANGDA Kota Tomohon telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Pemerintah (Money Follow Program Prioritas) Adapun masalah yang ditemui yaitu pada tahap pelaporan anggaran dimana anggaran yang telah ditetapkan di Renstra dan Renja kadang tidak sesuai dengan Anggaran di DPA, sebaiknya BAPELITBANGDA Kota Tomohon meningkatkan tahap perencanaan dan analisis program kerja yang akan dimasukkan dalam program kerja prioritas.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja

Abstract

This research was conducted to find out how the implementation of Performance-Based Budgeting in Regional Apparatus Work Units, especially in BAPELITBANGDA Tomohon City. This research is a descriptive qualitative research. The data collection techniques used in the research are; Interview Methods and Documentation Study Methods. Data analysis in this study used the technique; Data Collection, *Snowball Sampling*, Data Reduction, Data Display, Verification and Confirmation of Conclusions. The results in this research show that the implementation of Performance-Based Budgeting at the Tomohon City BAPELITBANGDA has been going well and in accordance with the Government's principles (Money Follow Priority Program). With the budget in the DPA, the Tomohon City BAPELITBANGDA should increase the planning and analysis stage of work programs that will be included in priority work programs.

Keywords : Performance-based budgeting

PENDAHULUAN

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat *fundamental* menuntut perlunya sistem perencanaan yang komperhensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokrasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Untuk mengalokasikan sumber dana supaya menjadi lebih efektif dan efisien sangat perlu adanya penganggaran, penganggaran ialah suatu proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Saat ini perubahan terjadi sangat signifikan dalam penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang dulunya (*line item*) *budgeting* sekarang menjadi anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*).

Prinsip untuk Anggaran Berbasis *line item* berfokus dan tujuan utamanya pada pendekatan tradisional, kemudian bersifat tahapan, masalah utama anggaran tradisional dan kinerja dinilai berdasarkan habisnya anggaran yang diusulkan, juga cenderung untuk menerima konsep biaya jasa historis. Prinsip dalam anggaran Berdasarkan badan pengawas keuangan dan pembagunan adalah transparansi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi anggaran, dan

pendekatan kinerja, dimana pendekatan yang dilakukan dengan menggabungkan semua proses perencanaan dan penganggaran dilingkup SKPD untuk memperoleh rencana kerja dan anggaran pendekatan anggaran, penganggaran berdasar prestasi kerja dilakukan dengan melihat saling terkaitnya antara pendanaan dengan *output* yang diharapkan.

Dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 supaya timbul pengelolaan keuangan di daerah untuk mencapai prinsip *good governance*, didalam peraturan yang ada, dinyatakan tentang cara menyusun (RKA-SKPD) ini berarti sudah tercapai kebutuhan untuk Anggaran Berbasis Kinerja, *output optimal* dituntut dan pengeluaran yang sudah dialokasikan agar ekonomis, efisien, efektif”

Mardiasmo dalam (Kukuh Prastianingrum et al., 2017) “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran sehingga anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output (Anton et al., 2016). Mardiasmo dalam (Anggaran et al., 2017) menyebutkan bahwa “Penganggaran berhubungan erat dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran dapat terealisasi dengan baik apabila dalam penganggaran tersebut ada dukungan aktif dan pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah, hal ini menyangkut hubungan antar manusia dalam melaksanakan kegiatannya”

Bastian dalam (Friska, n.d.) menjelaskan bahwa “Anggaran berbasis kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang di inginkan (*output dan outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatnnya bambang sancoko,dkk dalam (Sofyani & Prayudi, 2018), Menurut Julnez dan Holzer dalam (Wibisono & Riharjo, 2019) pengukuran kinerja berlandaskan konsep *value for money*, anggaran yang digunakan harus logis dan rasional untuk pengolahan suatu organisasi, untuk penggunaan perencanaan yang masuk akal secara alamiah agar bisa efektif dan efisien. Menyusun APBD di buat atas dasar kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga dan untuk melaksanakan urusan dalam pemerintah disusun berdasarkan kriteria biaya dan efisiensi dengan melihat hubungan antar pemerintah harus selaras.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang di inginkan (*output dan outcome*) sehingga setiap rupiah yang di dikeluarkan dapat di pertanggungjawabkan kemanfaatnnya bambang sancoko,dkk dalam (Sofyani & Prayudi, 2018), Adapun karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja ialah anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang dicapai juga memiliki hubungan diantara input dan output sesuatu yang akan direncanakan dan memiliki peranan indikator yang efisiensi didalam penganggarnya sehingga Anggran Berbasis Kinerja sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Anggaran berbasis kinerja harus disusun dari perencanaan strategis (Renstra) harus di susun se-objektif mungkin dan pihak dari pemerintah dan masyarakat juga harus terlibat supaya berjalan dengan baik juga harus ditentukannya standar harga, tolak ukur kinerja dan pelayan yang minimal memiliki standar sesuai UU. Adapun penjelasan mengenai siklus anggaran yang pertama Pada tahap persiapan anggaran pengeluaran diestimasi berdasarkan estimasi pendapatan yang tersedia, berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi untuk tahun depan. Selanjutnya didalam tahap penerapannya pengelolaan keuangan publik harusnya sesuai dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen Tahap Pelaporan dan Evaluasi Pada tahap ini anggaran yang sudah direalisasikan disajikan dalam bentuk pertanggungjawaban dari Pemda dan memperlihatkan akuntabilitas dari Pemda.

(Ningsih et al., 2018) juga memberi penjelasan tentang “Rencana anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu kerangka perencanaan yang menitikberatkan pada pencapaian

hasil kinerja atau imbal hasil dari anggaran tertentu atau pengaturan distribusi info, dalam anggaran harus memuat prinsip-prinsip bantuan normal dan biaya satuan yang dinilai dari segmen tindakan yang bersangkutan”.

Dasar hukum indikator kinerja dan pengukuran kinerja adalah peraturan pemerintah no 21 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa. “dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Selain itu, dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 (poin 1.4) dinyatakan bahwa: kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dan mengembangkan indikator kinerja, dan sistem pengukuran kinerja dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran. Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi).

Pemerintah perlu mengawasi dukungan publik yang bergantung pada gagasan penting dari kerangka perencanaan anggaran. Selama ini hal tersebut terjadi di masing-masing Kabupaten, selama waktu yang dihabiskan untuk penetapan, perbincangan hingga kepastian rencana belanja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan berbagai macam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Menurut (Wibisono & Riharjo, 2019) dalam penelitiannya berdasar UU NO 23 Tahun 2014 Pemda diberi kuasa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasar asas otonomi, karna hal tersebut Pemda di berikan APBD selama 1 tahun anggaran UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, “Dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai”

Tidak mudah bagi pemerintah saat ini untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja karena sistem penganggaran yang digunakan pemerintah dulu adalah *input base* dan skrang menjadi *output base*, pada instansi pemerintah anggaran berfungsi juga sebagai alat untuk perencanaan dan alat pengendalian serta *instrument* akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang akan di biyai dengan uang dari pemerintah.

Adapun masalah yang dikemukakan oleh (Octariani et al., 2017) “Permasalahan lain yang kerap terjadi terkait anggaran yaitu penganggaran belanja yang belum optimal, sehingga berdampak pada penyerapan APBD yang tidak maksimal dan cenderung terjadinya penyerapan pada akhir tahun” Keberhasilan suatu pemerintah dilihat dari APBD yang terealisasi dengan baik Juga dapat diselesaikan dari percakapan selama siklus penganggaran, yaitu tahap persiapan, tahap penarapan, dan tahap pelaporan. Kota Tomohon telah melaksanakan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang menggabungkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan rencana pengeluaran setiap SKPD agar bisa memberi data yang jelas untuk tujuannya, petunjuk, dan keterkaitan antara rencana keuangan. Kelompok masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan hasil dari latihan yang diatur atau direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai. BAPELITBANGDA Kota Tomohon merupakan salah satu SKPD yang telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) ialah salah satu lembaga penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang di pimpin oleh Gubernur/Bupati/walikota melalui Sekda. Lembaga ini mempunyai tugas untuk membantu Guberut/Bupati/walikota untuk menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. BAPELITBANGDA harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah daerah agar penyebaran anggaran bisa akuntabel dan transparan sehingga mampu bertanggungjawab kepada masyarakat agar dapat dinilai positif oleh masyarakat.

Mengingat Pemerintah telah melakukan perubahan dalam sistem penganggaran dari sistem Tradisonal menjadi sistem Anggaran Berbasis Kinerja maka Kinerja Pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja keuangan instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya di biyai oleh dana publik, apalagi yang tak kalah pentingnya bahwa terdapat

anggaran belanja yang dilimpahkan pada tiap daerah, khususnya Pemerintah Kota Tomohon, untuk mengelolah dana yang begitu besar disertai dengan program strategis yang dijalankan, sehingga diperlukan sistem yang tidak hanya melihat capaian dari suatu program, tetapi yang di harapkan adalah terciptanya *outcomes* dan *benefit*. Sehingga dianggap perlu untuk melihat penerapan dari sistem Anggaran Berbasis kinerja yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tomohon khususnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Tomohon.

Berdasarkan uraian terkait pentingnya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana dalam mewujudkan Pemerintah yang transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab serta berkeadilan khususnya pada penganggaran publik, maka Anggaran Berbasis Kinerja menjadi sangat menarik untuk diteliti dan tentunya dikaji lebih dalam, selain sistem penganggaran yang relative baru. Dengan baiknya pengelolaan sistem terhadap tahap persiapan dan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada BAPELITBANGDA Kota Tomohon serta tahap Evaluasi dan pelaporan anggaran dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Hal ini juga, akan menunjukan pengelolaan anggaran yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Adapun masalah yang ditemukan peneliti yakni bagaimana tahapan untuk persiapan penerapan sampai evaluasi anggaran berbasis kinerja serta evaluasi dan pelaporan pada BAPELITBANGDA di kota tomohon. Penelitian ini juga memiliki tujuan agar dapat mengetahui dan menganalisa tentang tahap persiapan dan penerapan serta evaluasi/pelaporan anggaran berbasis kinerja pada BAPELITBANGGDA Kota Tomohon.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu; Metode Wawancara dan Metode Studi Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik; Pengumpulan Data, *Snowball Sampling*, Reduksi Data, *Display Data*, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah 2 orang pekerja BAPELITBANGDA Kota Tomohon, terdiri dari 1 orang sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset bernama Florentina Mogi berinisial FM dan 1 orang sebagai Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bernama Joe Matindas berinisial JM. Dengan jumlah sumber ini, mereka telah memberikan data penting bagi para ilmuwan. Sesuai dengan target pengujian, metode yang digunakan adalah prosedur pengujian purposif, yang mengartikan bahwa strategi pemeriksaan sumber informasi dengan pemikiran bahwa individu dianggap paling menyadari tentang apa yang diharapkan oleh ilmuwan dan strategi pemeriksaan bola salju, lebih spesifik. Metode pemeriksaan sumber-sumber informasi, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, sedikit demi sedikit ternyata sangat besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) ialah salah satu lembaga penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/walikota melalui Sekda. Lembaga ini mempungai tugas untuk membantu Gubernur/Bupati/walikota untuk menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tahap persiapan Anggaran Berbasis Kinerja tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh BAPELITBANGDA Kota Tomohon untuk menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja menyimpulkan tentang tahapan yang dilakukan dengan struktur dimana data yang terkumpul dari target kinerja pembangunan dalam RKPD. Selanjutnya akan diolah dan pada tahapan ini akan terlihat perbandingan dari hasil yang sudah tercapai. Selanjutnya Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja ialah prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas semua dalam

penyusunan anggaran berbasis kinerja, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur pagu anggaran, Adapun peran Anggaran Berbasis Kinerja dalam penentuan visi, misi, sasaran, target, serta strategi organisasi ialah mengenai peran anggaran berbasis kinerja sangat mempengaruhi pencapaian baik visi, misi, sasaran dan target program prioritas. Maka dari itu program yang harus duluan dikerjakan dan diberikan anggaran sebagai prioritas dari BAPELITBANGDA Kota Tomohon. BAPELITBANGDA Kota Tomohon juga mempunyai proses penyusunan rencana kerja dan Anggaran tahunan dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja dimana pada prosesnya Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di kota Tomohon dilakukan setahun sebelumnya. Semuanya harus dirampungkan baru bisa direalisasikan untuk tahun depan, tapi jikalau dalam tahun berjalan terdapat urgensi maka anggaran bisa diterapkan ke program yang begitu urgensi. Tentu dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Maka dalam menyusun atau mempersiapkannya harus disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan pada rencana kerja pembangunan daerah (Renja). Standar biaya yang digunakan sebagai patokan dalam melakukan anggaran berbasis kinerja di BAPELITBANGDA Kota Tomohon maka satuan standar harga dan analisis satuan harga akan membantu dalam hal persiapan penyusunan anggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 Ayat (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Penyusunan standar satuan harga tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Oleh karenanya, penyusunan standar satuan harga ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya. BAPELITBANGDA memudahkan dalam hal melakukan perencanaan dan menentukan anggaran bahkan dengan adanya penyusunan anggaran berbasis kinerja membuat BAPELITBANGDA Kota Tomohon termudahkan untuk memilih program prioritas yang harus dikerjakan guna tercapainya visi dan misi dari Kota Tomohon.

Pada tahap penerapan anggaran berbasis kinerja yang di lakukan di BAPELITBANGDA Kota Tomohon peneliti juga ingin mengetahui tentang bagaimana cara penerapan dari penganggaran yang disusun dengan metode Anggaran Berbasis Kinerja, ternyata bahwa penerapannya meliputi pelaksanaan rencana/target pembangunan serta yang sudah ditetapkan menjadi program prioritas. Semuanya itu dapat dilihat pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), selanjutnya peneliti ingin mengetahui proses pengalokasian anggaran kepada semua program yang akan dilakukan dan pengukuran kinerja yang digunakan BAPELITBANGDA Kota Tomohon telah menggunakan prinsip *money follow program* prioritas dan menggunakan pengukuran *Outcome* dan *output* sesuai indikator dalam perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. prinsip *money follow program* dilakukan supaya dapat mengamankan pengalokasian dana program prioritas dan akan meningkatkan efisiensi untuk belanja prioritas. Penerapan pendekatan dilakukan dengan mengerucutkan usulan kegiatan utama, mengintegrasikan sumber sumber pendanaan serta pembahasan yang detail untuk persiapan proyek.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengukur kinerja suatu kegiatan yang sudah terlaksana dan kira-kira apa yang menjadi indikatornya ternyata BAPELITBANGDA Kota Tomohon melihat dari output kegiatan yang telah terlaksana dan tentunya ada indikator ketercapaian yang akan menjadi standar penilaian keberhasilan sebuah kinerja/program kerja yang sudah terlaksana. untuk saat ini BAPELITBANGDA Kota Tomohon memiliki standar yang nantinya menjadi indikator ketercapaian sebuah kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang terlaksana. Maksudnya, tetap ada standar penentuan indikator seperti; Indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output*, indikator kinerja *outcome*, indikator kinerja *benefit* dan indikator kinerja *impact*. Tapi setiap kegiatan yang jenisnya berbeda tidak bisa kita sama ratakan indikatornya, tentu harus disesuaikan juga. Dalam wawancara yang di lakukan BAPELITBANGDA Kota Tomohon menjelaskan tentang menyusun LAKIP dimulai dengan Menyusun tim kerja, kemudian mengumpulkan data, setelah itu akan dilakukan klarifikasi data, kemudian Menyusun rekap RKA/DPA, penyusunan kinerja, evaluasi, penyusunan narasi, dan akhirnya LAKIP. Meski

BAPELITBANGDA Kota Tomohon telah Menyusun anggaran dengan baik sering terjadi dalam pelaksanaannya kadang ditemukan sebuah ketidakcocokan atau dapat dikatakan masalah saat dilakukan evaluasi. Masalah yang sering muncul yakni; anggaran yang telah ditetapkan di renstra dan renja kadang tidak sesuai dengan anggaran di RKA/DPA, pembagian pagu ke BAPELITBANGDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berkenaan. Akuntabilitas dan transparansi tentu adalah hal yang selalu ditekan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Tomohon untuk mempertanggungjawabkannya ke publik/masyarakat guna menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kota Tomohon. Maka dalam tahap pemeriksaan dan evaluasi LAKIP dibuat sesuai prosedur yang ada tanpa memprioritaskan suatu pihak. BAPELITBANGDA Kota Tomohon ternyata memiliki unit sendiri dalam melakukan evaluasi program kerja pembangunan yang sudah terlaksana, unit ini ada pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Badan ini nantinya akan mengevaluasi kinerja melalui LAKIP yang sudah dibuat. Sampai saat ini, melihat semua hasil program kerja yang telah selesai, semuanya berjalan dengan sesuai perundang undangan yang ada, tata cara perencanaannya, pengendaliannya. dan evaluasinya di pembangunan daerah sesuai dengan RENSTRA dan juga bisa dilihat tahap realisasinya dan disusun ke LAKIP sebagai pertanggung jawaban ke masyarakat BAPELITBANGDA kota tomohon dilihat dari LAKIP yang ada sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber dimana jumlah rencana anggarannya untuk sekitar 18 progja prioritas adalah RP. 9.366.467.180,00 dari anggaran ini yang direalisasikan senilai Rp. 8.036.680.449. dengan persentasi 85,80%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan penelitian yang di lakukan di BAPELITBANGDA Kota Tomohon dapat di simpulkan pada tahapan perencanaan BAPELITBANGDA Kota Tomohon telah berjalan cukup baik, dengan alasan telah menggunakan standar yang sama dengan aturan pemerintah, khususnya *money follow* program priorias. Dengan aturan ini, Pemkot Tomohon juga dapat memahami visi, misi, tujuan dan pengembang Kota Tomohon dengan lebih baik. Selanjutnya pada tahap penerapan anggaran berbasis kinerja di BAPELITBANGDA Kota Tomohon melaksanakan rencana (target pembangunan serta program/kegiatan prioritas) yang telah tertata di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam hal ini untuk mendapatkan persetujuan dari dewan legislatif selalu ditemui masalah. Masalah yang sering ditemui yakni terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat indikator kinerja yaitu *outcome* dan *output*. Proses penyajian sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemerintah wajib mempublikasikan anggaran pembangunan daerah sampai dengan *level* kegiatan Kota Tomohon setiap tahun. Tahapan evaluasi program kerja dengan menggunakan metode Anggaran Berbasis Kinerja akan tertuang seutuhnya dalam LAKIP. Untuk itu penyusunan LAKIP pada BAPELITBANGDA Kota Tomohon dimulai dari penyusunan tim kerja, kemudian mengumpulkan data, klarifikasi data, menyusun rekap RKA/DPA, penyusunan kinerja, evaluasi, penyusunan narasi, LAKIP, sejauh ini sesuai dengan hasil evaluasi kinerja kegiatan yang sudah terlaksanan, deitemukan BAPELITBANGDA Kota Tomohon sudah sesuai dengan RENSTRA dan RENJA.

Adapun beberapa ide atau gagasan yang di berikan penulis terhadap BAPELITBANGDA Kota Tomohon Kepada BAPELITBANGDA Kota Tomohon untuk meningkatkan tahap perencanaan dan analisis program kerja yang akan dimasukan dalam program kerja prioritas. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang penetapan anggaran tahunan dengan menggunakan metode Anggaran Berbasis Kinerja dan melaporkan/memberitahukan LAKIP kepada masyarakat guna untuk mempertahankan keadilan dan transparansi Pemerintah Kota Tomohon. Serta meningkatkan Kualitas dan kinerja BAPELITBANGDA Kota dalam tahap persiapan dan evaluasi program kerja prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611628.
- Anggaran, S., Pengendalian, D. A. N., & Pada, I. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran*

- Berbasis Kinerja , Ketepatan. 23.
- Anggraeni, F. (2020). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)* *The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government* . 1(1), 36–44.
- Anton, M. G., Tinangon, J., & Elim, I. (2016). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 553–563. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i3.14289>
- Batanghari, K. (n.d.). *H. Junaidi dan Asep Machpudin 2*). 47–58.
- Friska, I. Y. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi*.
- Jusuf, J. B. K., Raharja, A. T., Mahardhika, N. A., & Festiawan, R. (2020). Pengaruh teknik effleurage dan petrissage terhadap penurunan perasaan lelah pasca latihan Pencak Silat. *Jurnal Keolahragaan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21831/jk.v8i1.30572>
- Ledo, D. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah, Pengendalian Internal, Penerapan Anggaran berbasis kinerja, dan penerapan sap berbasis akrual terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 1(3), 121.
- Ningsih, S., Wirahadi, A., & Fontanella, A. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 1–16.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3621>
- Prastianingrum, K. et al. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor. *Jurnal Akuntansi*, 5(September), 56–68. <https://dev.tablewear-th.com/index.php/ja/article/download/138/109>
- Prastianingrum, Kukuh, Sudarmanto, E., Ilmiyono, A. F., & Nurdialy, M. (2017). *TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR PERIODE 2014-2017*. 1–10.
- Reza Nanda., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No(1), 327–340.
- Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)* Indriani. 75–81.
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p06>
- Talumepa, I. C., Tinangon, J. J., Mawikere, L. M., Ekonomi, F., Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2015). *evaluasi penerapan permendagri nomor 21 tahun 2011 pada pengelolaan keuangan daerah di kabupaten minahasa utara state number 21 of 2011 on financial management area in north*. 15(05), 1–9.
- Verasvera, F. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.
- Verasvera, F. A. (2018). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (studi kasus pada dinas sosial provinsi jawa*. 6(1), 45–68.

- Wāḏani, N. D., & Silvia, D. (2021). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 6(1). 6(1), 47–56.
- Wibisono, S., & Riharjo, I. B. (2019). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 8,(September).